

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI KE PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA (KCIC), TEGALLUAR BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024 TANGGAL 1 – 3 DESEMBER 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2023



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI KE PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA (KCIC), TEGALLUAR BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024 TANGGAL 1 – 3 DESEMBER 2023

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Komisi VI DPR RI, pada tanggal 1 sd. 3 Desember 2023 telah menuntaskan pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka peninjauan operasional Kereta Cepat Indonesia-China di Stasiun Tegalluar.

Kunjungan Spesifik ini dinilai penting setelah Presiden Joko Widodo meresmikan KCIC, kemudian dinamakan Kereta Cepat Whoosh pada 2 Oktober 2023. *Woosh* adalah Kereta Cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dan sejak saat itu resmi beroperasi dinikmati masyarakat umum.

Dengan adanya kereta cepat *Woosh* ini, prospek kedepan integrasi transportasi modern akan sangat baik. *Woosh* akan mengintegrasikan transportasi modern berjarak 140,9 km, menghubungkan empat stasiun: Halim (Jakarta), Karawang, Walini dan Tegalluar (Bandung) hanya dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Di setiap stasiun, rencananya, akan dibangun *Transit Oriented Development* (TOD) mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung. Kereta cepat ini mampu mengangkut 583 orang sekali jalan kecepatan bisa mencapai 350 km/jam.

Harga tiket dinilai relatif terjangkau Masyarakat kebanyakan yaitu sekitar Rp200.000 (per Desember 2023). Dalam perencanaannya, *Woosh* terintegrasi dengan jenis-jenis transportasi masal yang dirancang menunjang satu sama lain oleh LRT Bandung Raya, begitu pula MRT di Jakarta. Hal ini bertujuan meningkatkan kecepatan mengantar orang dan barang sebagai faktor penentu kompetisi atau daya saing.

Beroperasinya *Woosh* tidak terlepas dari eksistensi dan keberadaan PT KAI (Persero) sebagai perusahaan pelaksana proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung *Woosh*. Pada 24 Februari 2021 PT KAI (Persero) mendapatkan PMN TA 2022 mendanai penugasan proyek strategis dan restrukturisasi. Usulan ini disetujui setelah Menteri BUMN mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan tentang Permohonan usulan PMN PT KAI sebagai salah satu BUMN penerima PMN sebesar Rp.10 Triliun. Usulan PMN ini, kemudian dikoreksi menjadi Rp.4,1 Triliun.

Salah satu alasan usulan PMN PT KAI TA 2022 ini digunakan menutup pembengkakan biaya atau PT KAI menyebut dengan istilah *Cost Overrun* pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Setelah mengalami beberapa perkembangan dalam proyek tersebut, pada Rabu 23 November 2022, Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2022 kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp. 3,2 trilyun, berasal dari cadangan investasi APBN Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas Cost Overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Usulan tersebut disetujui mengingat PT KAI (Persero) telah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KCJB atas Cost Overrun Proyek KCJB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Kunker Spesifik ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dimana DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

B. Objek Kunjungan Kerja

Objek Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI pada tanggal 1-3 Desember 2023 adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka peninjauan operasional Kereta Cepat Indonesia-China di Stasiun Tegalluar.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bertujuan menjalankan Fungsi Pengawasan dengan melihat secara langsung sejauh mana operasional Kereta Cepat Indonesia-China di Stasiun Tegalluar dan bagaimana dampaknya pada kinerja PT KAI.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Guna mendapatkan gambaran sesuai maksud dan tujuan kunjungan Kerja tersebut di atas, Komisi VI DPR RI melakukan tatap muka dengan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) serta berbagai pihak berkenaan maksud dan tujuan Kunspek di Provinsi Jawa Barat dari 1 sd. 3 Desember 2023 tersebut.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim kegiatan Kunspek Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut::

NO.	NO.	N A M A	KETERANGAN
	ANGG.		
1.	A-33	FAISOL RIZA, S.S.	KETUA KOMISI VI / F-PKB
2.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. KOMISI VI / F.PDIP
3.	A-318	M. SARMUJI, S.E., M.Si.	PIMP. KOMISI VI / F-GOLKAR
4.	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	PIMP. KOMISI VI / F-NASDEM
5.	A-161	Prof. (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.	F.PDIP
6.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F.PDIP
7.	A-208	dr. H. MUFTI A.N ANAM	F.PDIP
8.	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F.PDIP
9.	A-274	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA	F.PG
10.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.PG
11.	A-302	NUSRON WAHID	F.PG
12.	A-65	ANDRE ROSIADE	F.PGERINDRA
13.	A-115	KHILMI	F.PGERINDRA
14.	A-96	MULAN JAMEELA	F.PGERINDRA
15.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F.NASDEM
16.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H.	F NASDEM
17.	A-36	Ir. H. M. NASIM KHAN	F.PKB
18.	A-544	Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F.PD
19.	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc.	F.PD
20.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F.PKS
21.	A-485	Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.	F.PAN
22.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos.	F.PAN
23.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

2. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE PROVINSI JAWA BARAT

Komisi VI DPR RI menyoroti beberapa hal penting berkenaan dengan maksud dan tujuan kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat, serta memberi masukan dan catatan seperti disampaikan di bawah ini:

- Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada PT KAI (Persero) dan PT KCIC atas beroperasinya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), kemudian dinamakan Kereta Cepat Whoosh. Komisi VI DPR RI menilai pembangunan transportasi massal Woosh berguna memberikan pelayanan transportasi modern kepada masyarakat sekaligus menjadi tonggak kemajuan sektor perkeretaapian di Indonesia;
- Komisi VI DPR RI menilai moda transportasi KCJB Woosh memberikan berbagai kemudahan seperti penggunaan teknologi kereta api super canggih berkecepatan tinggi, kenyamanan dan memperhatikan aspek keselamatan yang ketat;

- Komisi VI DPR RI mengharapkan kehadiran KCJB Woosh menjadi pelengkap ekosistem transportasi kereta api dan mampu mendorong potensi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan, pertumbuhan pengembangan perekonomian wilayah dan kawasan;
- Komisi VI DPR RI menilai progress operasional KCJB Woosh telah sesuai dengan harapan dan memberikan apresiasi atas kebersihan dan kenyamanan fasilitas Hanggar kereta. Diharapkan, hal-hal yang telah berjalan dengan baik dipertahankan kedepan dan menjadi titik awal bagi kemajuan transportasi kereta api modern di Indonesia;
- Komisi VI DPR RI mendorong Pembangunan moda transportasi Woosh
 Jakarta Bandung menjadi tonggak awal terbukanya ekosistem dan SDM
 Kereta Cepat di Indonesia;
- Komisi VI DPR RI mendorong pembangunan perpanjangan proyek KCIC dilanjutkan hingga sampai ke Kota Surabaya, sebab Kereta Cepat Indonesia – China, menghubungkan Jakarta – Bandung – Surabaya akan menjadikan akivitas masyatakat di Pulau Jawa menjadi lebih cepat dan mudah;

Saat melakukan unjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Tegalluar 1 – 3 Desember Komisi VI DPR RI mendapatkan temuan serta memberikan catatan kepada PT KAI (Persero) dan PT KCIC sebagai berikut:

 Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar terus meningkatkan dukungan pada proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung terutama dalam pemenuhan kewajiban pendanaan termasuk dukungan peningkatan kapasitas keuangan KAI terutama berkenaan penugasan PT KAI (Persero) dilaksanakan berdasarkan Perpres no 107 Tahun 2015 (sebagaimana dirubah melalui Perpres no 93 Tahun 2021). Hal ini penting agar kinerja Keuangan PT KAI (Persero) bersama dengan 3 BUMN lainnya yakni PT WIKA (Persero) Tbk, PTPN8, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mendapatkan tugas melaksanakan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak terganggu kinerja keuangannya;

- Komisi VI DPR RI menilai beroperasinya KCJB Whoosh pada 2 Oktober 2023 menjadi tonggak kemajuan perkereta-apian Indonesia. Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI mendorong PT KAI (Persero) sebagai Lead Consortium proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi BUMN yang bertanggung jawab atas Transfer Technology dan Transfer Knowledge teknologi Kereta Cepat. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama Indonesia mampu membangun proyek serupa secara berdikari tanpa ketergantungan dari negara lain;
- Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah membuat payung hukum tentang penugasan transfer technology dan transfer knowledge kepada PT KAI (Persero) mengingat proyek kereta cepat adalah proyek Jangka menengah dan jangka panjang, sehingga memerlukan sumber daya manusia terlatih dan sumber dana yang besar;
- Tentang Connectivity Komisi VI DPR RI melihat prospek kedepan integrasi transportasi modern kereta cepat Woosh akan sangat baik. Woosh akan mengintegrasikan transportasi modern berjarak 140,9 km, menghubungkan empat stasiun: Halim (Jakarta), Karawang, Walini dan Tegalluar (Bandung) hanya dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Di setiap stasiun, rencananya, akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung;
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi telainnya termasuk Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR agar tujuan terbangunnya *Transit Orinted Development* di koridor Jakarta – Bandung dapat direalisasikan;

- Dalam Kunker Spesifik ke Stasiun Tegalluar Komisi VI DPR RI melihat beberapa infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana masih perlu dibangun dan ditingkatkan Koordinasinya dengan pihak lain antara lain:
 - Akses masuk dari jalan Tol Cipularang Padaleunyi PT KAI (Persero) dan PT KCIC diharapkan dapat berkerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk membuka akses masuk dari jalan tol secara langsung ke Stasiun KCJB khususnya di KM 147 Tol Padaleunyi dari arah Gerbang Tol Cileunyi ke arah Stasiun Tegalluar . Hal ini dinilai penting guna meningkatkan Tingkat keterisian penumpang dan pengembangan Kawasan di sekitar proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung;
 - Lampu penerangan stasiun dan Kawasan di sekitar stasiun PT KAI (Persero) dan PT KCIC didorong berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar menyediakan lampu penerangan di setiap stasiun KCJB demi keamanan dan kenyamanan penumpang KCJB Woosh;
 - 3. Penataan lalu-lintas dan parkir kendaraan PT KAI (Persero) dan PT KCIC dirasakan masih perlu meningkatkan penataan parkir baik antar-jemput penumpang (drop off) maupun parkir inap dengan keamanan dan harga karcis yang terjangkau. Berkenaan dengan hal efektifitas waktu, PT KAI (Persero) perlu berkoordinasi dengan POLRI sehubungan pengaturan lalu lintas menghindari kemacetan dari dan menuju stasiun KCJB;
 - 4. Penataan Kios/Lapak UMKM Komisi VI DPR RI memandang salah tujuan keberadaan proyek KCJB adalah pemerataan Pembangunan dan dirasakan manfaatnya terutama bagi Masyarakat Jawa Barat, Karena itu PT KAI (Persero) dan PT KCIC perlu menyediakan lapak nyaman dan tertata, serta terjangkau harganya yang disediakan bagi warga asli sekitar Stasiun KCJB. Berkenaan dengan hal tersebut Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah melakukan koordinasi dengan Pemda setempat memanfaatkan keberadaan

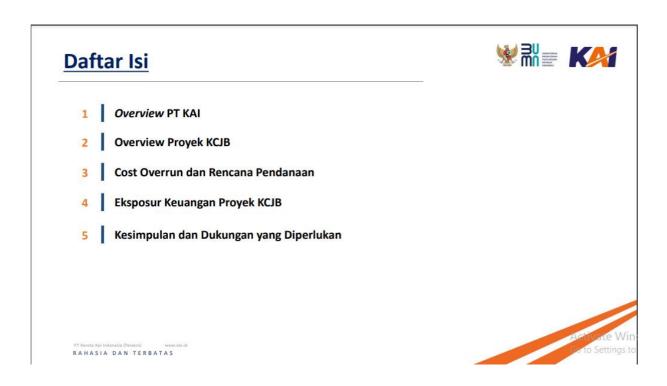
stasiun KCJB bagi UMKM lokal;

- 5. Penyediaan Kendaraan Komuter memenuhi Tingkat keterisian penumpang KCJB Woosh, PT KAI (Persero) dan PT KCIC perlu lebih proaktif meningkatkan pelayanan. Salah satunya menyediakan Komuter, menghubungkan stasiun KCJB dengan calon penumpang. Beberapa segmen dinilai berpotensi menjadi penumpang KCJB adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa/Pelajar PT KAI didorong bekerjasama dengan Perum Damri menyediakan Shuttle bus menghubungkan Stasiun Tegalluar dan Padalarang dengan perguruan tinggi di Bandung. Salah satu contoh penting yang diperlukan adalah Komuter terjadwal menghubungkan Stasiun KCJB Tegalluar dengan kampus Uiversitas Padjajaran/Institut Teknologi Bandung di Jatinangor. Informasi didapat saat Kunspek, Komuter dari Tegalluar hanya melayani rute ke Terminal Gedebage, Kota Bandung;
- b. Wisatawan/Business Trip PT KAI (Persero) dirasakan perlu bekerjasama dengan perusahaan Shuttle swasta menyediakan kendaraan terjadwal menghubungkan Stasiun KCJB dengan obyek wisata/pusat perbelanjaan di Bandung dan Jakarta
- c. Turis Asing Woosh adalah Kereta Cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, oleh sebab itu berdasarkan masukan saat Kunspek, banyak turis asing menjadi penumpang Woosh. Komisi VI DPR RI mendorong PT KAI (Persero) dan PT KCIC menyediakan fasilitas pertunjukan kebudayaan lokal di Stasiun KCJB utamanya di Stasiun Padalarang dan Tegalluar atraksi budaya lokal.

Pada kesempatan tersebut, Direksi PT KAI (Persero) dan PT KCIC memberikan pemaparan dihadapan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Barat sebagai berikut:

PT KAI (Persero)









Sekilas Milestone Tahun 2023





Mar

 Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kereta antara KAI, KCI, dengan INKA sekaligus acara peresmian Workshop Banyuwangi INKA.

■Pemasangan Face Recognition di Stasiun Yogyakarta, Solo, Surabaya Gubeng & Malang.

May

Pemasangan Face Recognition di Stasiun Gambir, Cirebon & Surabaya Pasar

Aug Peresmian Comercial Operation Date (COD) LRT 28 Agustus 2023 oleh Presiden RI di

Kereta Cepat Jakarta KAI Expo 2023 Stasiun LRT Cawang dengan tema "Crafting Your Journey" di JCC

■Uji Coba Terbatas

Sep

Okt Peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) "Whoosh" di Stasiun Halim oleh Presiden RI

> Joy Ride Kereta Suite Class Kompartemen

Penandatanganan Perjanjian Angkutan Batubara antara KAI dan PT BA untuk periode 2023-2027

KAI mensukseskan program mudik lebaran 1444H

■Perubahan jangka waktu pembatalan/ubah jadwal pada aplikasi KAI Access semula paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan menjadi 2 jam sebelum keberangkatan

Update Rating Perusahaan per tanggal 13 April 2023 naik menjadi idAAA Stable Outlook

 Uji coba top speed kereta cepat 350km/jam.

 Peluncuran Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023 - waktu perjalanan kereta api akan lebih efisien.

RUPS Pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2022.

Stasiun Semarang Tawang

Pemasangan Face Recognition di

Pemberlakuan GAPEKA baru 2023 per 1 Juni 2023 Perjalanan KA Baru mulai Gapeka 2023 :

✓ KA Argo Merbabu relasi Smt-Sgu PP

✓ KA Argo Semeru relasi Sgu-Gmr PP

✓ KA Manahan relasi Slo-Gmr PP ✓ KA Pandalungan relasi Gmr-Jr PP

✓ KA Banyubiru relasi Slo-Smt PP

 SE Menhub nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada masa transisi endemi corona virus desease 2019 (covid-

19) berlaku mulai 12 Juni 2023.

RAHASIA DAN TERBATASTINGS

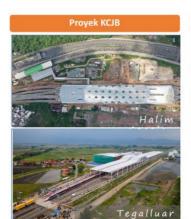
Ringkasan Penugasan KAI (1 dari 2)







 LRT Jabodebek bertujuan untuk pengembangan wilayah Jabodebek dan KAI ditunjuk sebagai penyelenggara proyek.



 KCJB merupakan salah satu proyek PSN yang memiiki Panjang trase 142,3 Km dengan 4 stasiun pemberhentian.





- Mencakup trase dari Bogor, Bekasi, Serpong, dll
- Sebelum pandemi mengangkut >350 juta juta penumpang/tahun
- Jumlah perjalanan Kereta 627.495 KA/hari*

RAHASIA DAN TERBATAS

11

■ Ringkasan Penugasan KAI (2 dari 2)









Capex: Rp ~206 Miliar Pendanaan melalui ekuitas UU 23 2007



KAI hanya mengoperasikan KA Bandara UU 23 2007



Capex: ~Rp 3.564 M

PERPRES 83/2011 & PERPRES 58/2017



PERPRES 58/2017 PERMENKO PEREKONOMIAN 12/2015



Capex: Rp ~49,4 M Pendanaan melalui ekuitas UU 23 2007



Capex: Rp ~388 Milian Pendanaan melalui ekuita: PERPRES 116/2015 & PERPRES 55/2016



■ Kinerja Pendapatan dan Laba (Rugi) 2019- RKAP 2023









* Subject to dukungan terkait penyelesaian tata kelola IMO-TAC

RAHASIA DAN TERBATASTINGS TO

Kinerja Neraca Konsolidasi 2019 s.d. 2023





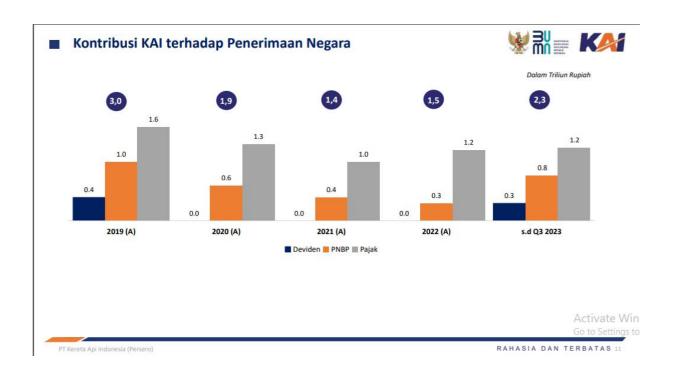
Total Aset dan Liabilitas (dalam miliar Rupiah)

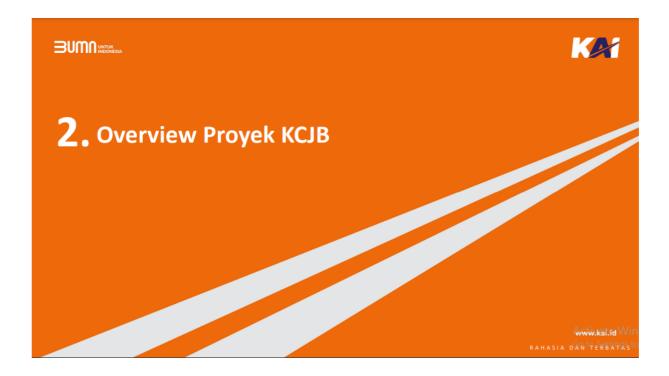


33,060 29,729 29,080 29,823 30.517 27,590 23,598 19,806 15,555 17,226 2019 (A) 2020 (A) 2021 (A) 2022 (A) s.d Sept 2023 2023 (RKAP) ■ Total Debt ■ Equity

Activate Win

PT Kereta Api Indonesia (Persero)





Overview Proyek KCJB





Penugasan KAI - Berdasarkan Perpres no 107 Tahun 2015 (sebagaimana dirubah melalui Perpres no 93 Tahun 2021) PTKAI bersama dengan 3 BUMN lainnya (WIKA, PTPN 8, dan Jasa Marga) mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ("KCJB"). Dalam Perpres No. 93 Tahun 2021 menyatakan bahwa KAI merupakan lead konsorsium dan memungkinkan penggunaan APBN dalam bentuk PMN untuk pemenuhan kewajiban base equity serta pemenuhan kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun).



- KCIC sebagai pemilik proyek KCJB merupakan perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan, dengan proporsi kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%.
- Proyek ini didanai melalui 25% ekuitas dan 75% utang dari China Development Bank ("CDB"). Total Fasilitas pinjaman yang dberikan oleh China Development Bank (CDB) kepada Proyek KCIC adalah sejumlah US\$ 4,55 milyar dengan tenor 40 tahun.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini telah melalui masa uji coba publik gratis dan per tanggal 17 Oktober 2023 telah memasuki fase inaugurate commercial (mulai berbayar). Proyek KCJB ini resmi CoD pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Seiring berjalannya waktu, sehubungan dengan adanya kendala pembebasan lahan dan adanya dampak dari Pandemi Covid-19, proyek ini mengalami kemunduran yang seharusnya dapat beroperasi pada tahun 2022 direncanakan menjadi tahun 2023. Dampak dari kemunduran proyek tersebut menimbulkan adanya penambahan biaya (cost overrun).
- Dari total nilai cost overrun hasil reviu BPKP sebesar **USD1,449 Miliar**, selanjutnya berdasarkan Kesepakatan Komite KCJB dan Persetujuan Menteri Keuangan nilai cost overrun proyek KCJB yang disepakati oleh NDRC adalah sebesar **USD1,206 Miliar**.
- Total PMN yang diterima oleh KAI yang digunakan untuk penugasan Proyek KCJB adalah sebagai berikut :
 - 1. PMN TA 2021 = Rp 4,3 Tn 2. PMN TA 2022 = Rp 3,2 Tn TOTAL PMN Rp 7,5 Tn
- Saat ini pemenuhan porsi ekuitas (25%) telah terpenuhi, namun terdapat potensi kelebihan PMN 2022 atas hasil kesepakatan nilai cost overrun yang nantinya akan digunakan sebagai buffer untuk penjaminan KAI dalam pembayaran pinjaman kepada CDB sesuai keputusan Komite KCJB tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-534/MK.06/2023 tanggal 5 Juli 2023.
- Saat ini sedang dilakukan proses pemenuhan cost overrun porsi pinjaman (75%) baik oleh pihak Indonesia maupun Pihak China.

Activate Wir

PT Kereta Api Indonesia (Persero

Cost

RAHASIA DAN TERBATAS 13

Struktur Proyek KCJB Seiring dengan terbitnya Perpres 93/2021 yang diikuti dengan tambahan PMN pada KAI tahun 2021 sebesar Rp 4,3 triliun, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur permodalan KAI menjadi majority/lead konsorsium di PSBI dari sebelumnya berdasarkan Perpres 107/2015 dipegang oleh WIKA 7,08% 1.03% **58,56%** 33,33% 51,37% 1,21% 42,88% 5.0% 12% 10,12% itial Rudaet (dalam juta US\$) (Total US\$6.071 juta) (dalam juta US\$) (Total US\$7.277 juta) Kontraktor EPC / HSRC 25% dari Total 75% dari Total Nilai Proyek 181 70 Total Nilai Awal Proyek = Facility Agreement USD 6,07 milyar : 14 Mei 2017 Ditandatangani 4.55 5,454 Plafond USD 4.55 milvar Kontrak EPC 40 tahun Tenor Ditandatangani 4 April 2017 Grace Period 10 tahun : USD 4,7 milyar : 90.6%**) Week-2 Okt 2022 Nilai Kontrak awal Suku bunga USD 2% p.a. Konsesi Penyelenggaran Kereta Cepat Progress Pekerjaan Ditandatangani : 16 Maret 2016 (add-4 Oktober 2017) CNY 3.5% p.a Pinjaman CDB *) CRIC = China Railway International Co. Ltd Masa konsesi : 50 tahun (dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perjanjian konsesi) CREC = China Railway Engineering Corporation CRRC = China Railway Rollingstock Corporation Ekuitas Beijing Yawan Ekuitas PSBI CRSC = China Railway Signal and Comunication Co. Ltd **) Progress Pekerjaan berdasarkan perhitungan penyerapan n

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

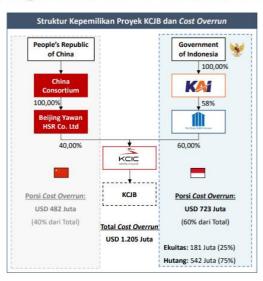
RAHASIA DAN TERBATAStillas to



Ringkasan Cost Overrun dan Rencana Pendanaan Pendanaan







- Penugasan Proyek KCJB Proyek KCJB merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres 107 tahun 2015, sebagaimana dirubah pada Pepres 93 tahun 2021 dimana KAI menjadi lead dari Konsorsium Indonesia.
- Cost Overrun Terdapat cost overrun atas dampak dari kemunduran Proyek KCJB sebesar US\$ 1,2 milyar yang telah disepakati oleh Pihak Indonesia dan China (NDRC)
- Pembiayaan Cost Overrun berdasarkan existing document ditanggung seluruhnya oleh pihak sponsor (PSBI dan Beijing Yawan). Dalam pertemuan di Beijing Juli 2022, dr pihak Indonesia mengusulkan agar 75% dari cost overrun, khususnya porsi Indonesia, dapat dibiayai melalui pinjaman. Dari pihak China secara prinsip menyetujui, dengan syarat pinjaman tersebut dijamin oleh Pemerintah Indonesia.

Pembiayaan cost overrun dari ekuitas

- KAI sebagai lead konsorsium Indonesia telah menerima tambahan PMN sebesar Rp 3,2 triliun pada 31 Desember 2023 dengan asumsi nilai cost overrun sebesar USD 1,4 milyar (Reviu BPKP).
- Dengan kesepakatan nilai cost overrun akhir yaitu USD 1,2 milyar, KAI telah melakukan realisasi penyetoran porsi ekuitas sebesar Rp 2,7 T
- Pembiayaan cost overrun dari pinjaman dibutuhkan pembiayaan sebesar US\$ 542 juta untuk pemenuhan *cost overrun* porsi *loan* Indonesia atau setara dengan Rp8,1 triliun (kurs 15.000).

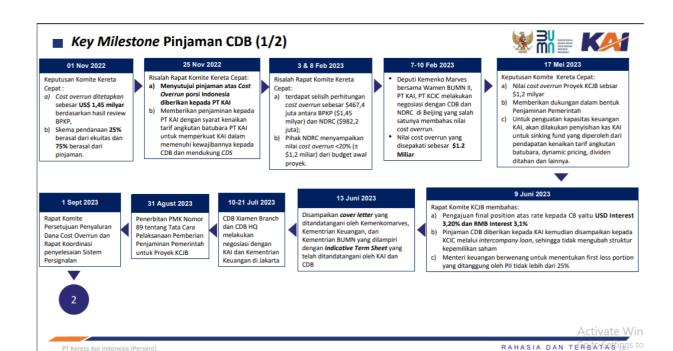
Perubahan Perpres 105/2015 menjadi Perpres 93/2021

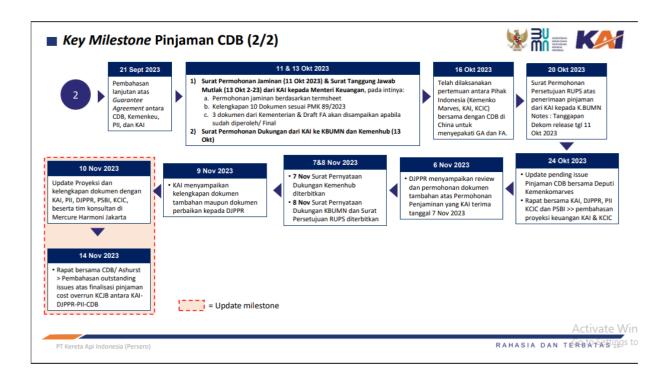




Aspek	Perpres 107 Tahun 2015	Perpes 93 Tahun 2021
Pimpinan konsorsium	WIKA	KAI
Trase Jalur	Jakarta-Walini-Bandung	Jakarta – Padalarang - Bandung
Pembentukan Komite Kereta Cepat	[Tidak ada diatur]	Dibentuk Komite yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Perhubungan
Pendanaan APBN pada Proyek KCJB	Tidak menggunakan dana APBN	 Memungkinkan pembiayaan dari APBN berupa PMN atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium (KAI)
		 PMN dapat diberikan untuk: Pemenuhan kewajiban base equity Pemenuhan kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun)
		 Pengajuan dukungan pemerintah untuk cost overrun diajukan oleh KAI untuk kemudian dilakukan review oleh BPKP. Hasil review akan dipergunakan oleh Komite Kereta Cepat untuk pengambilan keputusan
		 Penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium dapat diberikan dalam hal KAI memerlukan pinjaman untuk pemenuhan kewajiban setoran modal akibat terjadinya cost overrun yang tidak dapat dipenuhi PMN.
Menteri Koordinator percepatan Proyek KCJB	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Pemanfaatan lahan sepanjang trase	[Tidak ada diatur]	Pemanfaatan lahan BMN sepanjang trase dilakukan oleh KAI

Activate Win RAHASIA DAN TERBATASTINGS TO





Key Commercial Terms Facility Agreement CDB Loan



Items	Indicative Terms
Tujuan Penggunaan	Pendanaan cost overrun porsi pinjaman Konsorsium Indonesia
Total Fasilitas	USD 542,700,000 Facilitas A: US\$325,620,000, 60% dari total fasilitas Facilitas B: RMB equivalent of [US\$217,080,000], 40% dari total fasilitas
Tenor	45 Tahun
Grace period	15 Tahun
Availability Period	18 Bulan
Interest	 Fasilitas A (US\$): 3.2%. per tahun; dan Fasilitas A (RMB): 3.1% per tahun.
Jaminan	Jaminan Pemerintah, dengan PII sebagai first loss absorbtion sampai dengan 25% dari total fasilitas
Repayment	KAI Proposal, to be agreed subject to negotiation [Year 0 – 15: 0% (Grace Period); Year 16-25: 1.0% p.a.; Year 26-35: 3.5% p.a.; Year 36-45: 5.5% p.a]

Activate Wir

RAHASIA DAN TERBATAS 20

PT Kereta Api Indonesia (Persero)







Kesimpulan dan Dukungan yang Diperlukan





Dukungan Peningkatan Kapasitas Keuangan KAI

- Sehubungan dengan penugasan Proyek KCJB, Komite Kereta Cepat telah memtuskan dukungan kepada KAI, diantaranya: melalui kenaikan tarif angkutan batubara dan *unpaid dividen*. Namun masih terdapat dukungan $pendanaan \ tambahan \ yang \ harus \ dihimpun \ KAI \ untuk \ dapat \ meng-absorb \ dampak \ dari \ eksposur \ debt$ service CDB dan kebutuhan cash deficiency support. Hal ini dapat mempengaruhi kapasitas keuangan KAI.
- Diperlukan basis hukum/penugasan yang jelas jika KAI diharuskan menanggung kebutuhan cash deficiency support untuk porsi konsorsium Indonesia melebihi persetase kepemilikan

Terdapat kebutuhan setoran modal tambahan KCI, KAI mengusulkan dukungan tambahan PMN sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp 5,0 T dengan rincian Rp 2,0 Triliun tahun 2024; Rp 1,50 Triliun tahun 2025 dan Rp 1,50 Triliun tahun 2026 untuk penambahan sarana baru dan peremajaan sarana KRL Jabodetabek untuk tetap dapat memberikan pelayanan optimal pelayanan kepada Penumpang dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Pemenuhan Kuota BBM bersubsidi

Pemenuhan kebutuhan kuota BBM bersubsidi untuk transportasi menggunakan kereta api :

- Angkutan penumpang
- Mendukung pemerintah daerah dalam rangka mengalihkan angkutan barang berbasis jalan raya menjadi berbasis rel dengan tujuan mengurangi beban jalan raya, mengurangi kemacetan, polusi udara, kerusakan jalan dan dampak eksternalitas lainnya.
- Angkutan komoditi KA angkutan Batubara untuk memenuhi kebutuhan PLN, dalam rangka meningkatkan ketahanan dan pemenuhan kebutuhan energi nasional

Kesimpulan dan Kebutuhan Dukungan





IMO Perbaikan tata kelola penugasan dan penyelesaian selisih/backlog dana IMO melalui perubahan Perpres 53/2012 untuk menjamin kelayakan dan keandalan operasi prasarana perkeretaapian atas hal-hal sebagai berikut :

- Penugasan dari Menteri Perhubungan kepada PT KAI (Persero) untuk pelaksanaan IMO harus didukung alokasi DIPA dalam APBN yang memadai dan secara finansial fisibel dengan mengakomodir seluruh biaya yang dikeluarkan dan termasuk margin yang diharapkan serta dikaji dan disepakati bersama dengan KAI, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut;
- Penyelesaian selisih/backlog dana IMO melalui mekanisme selisih lebih/kurang dana IMO dari Pemerintah melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Apabila hasil audit menyatakan selisih lebih/kurang dana IMO dari Pemerintah maka harus dianggarkan dalam APBN dan dibayarkan ke PT KAI (Persero) sebagai Penerima Penugasan;
- Mekanisme selisih lebih/kurang dana IMO sesuai butir b diatas diberlakukan untuk penyelesaian selisih/backlog dana IMO Tahun 2023 dan selisih/backlog dana IMO Tahun 2015 s.d 2022.

Perbaikan Tata Kelola IMO dan TAC

- Perbaikan PMK Nomor 138/PMK.02/2021 sebagai berikut:
 - a. Melibatkan PT KAI sebagai wajib bayar dalam semua proses penyusunan sampai dengan terbentuknya Revisi PMK Nomor 138/PMK.02/2021:
 - b. Mengeluarkan pembebanan biaya depresiasi atas tanah yang tidak sesuai dengan PSAK 16 dan biaya depresiasi aset yang tidak belum atau tidak digunakan oleh KAI karena masih dalam konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. Pembebanan biaya IMO sesuai dengan realisasi:
 - d. Menghitung penggunaan panjang jalur rel sesuai dengan realisasi panjang jalur rel saat ini;
 - e. Faktor Prioritas harus memperhatikan keberlangsungan badan usaha maksimum 0,75 sesuai dengan PP15/2016.
 - f. Harus melibatkan pola self assessment;
- Kebijakan pembebasan pembayaran TAC bagi PT KAI yang saat ini melaksanakan beberapa penugasan Proyek Strategis Nasional Pemerintah sampai dengan kondisi keuangan dinyatakan layak dan telah dilakukan perbaikan tata kelola IMO.
- Pembatalan/penyesuaian billing PNBP TAC tahun 2023 yang telah terbit untuk PT KAI, KCI, dan Railink menggunakan Perubahan PMK Nomor 138/PMK.02/2021 agar sejalan dengan amanat dalam Surat DJA Tanggal 17 November 2023.

RAHASIA DAN TERBATAS TO Settings to

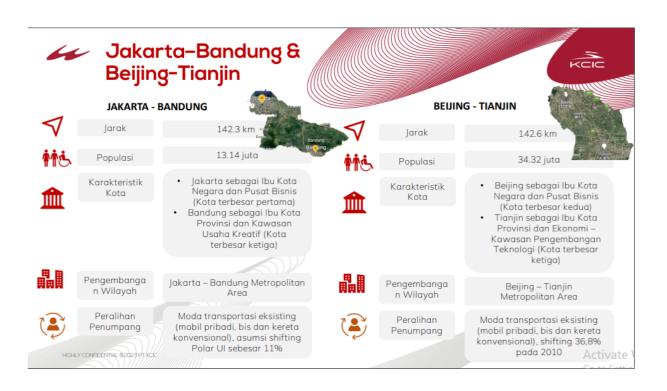


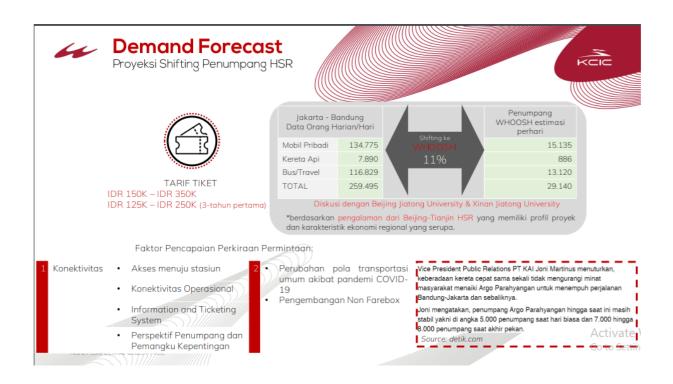
PT Kereta Cepat Indonesia - China

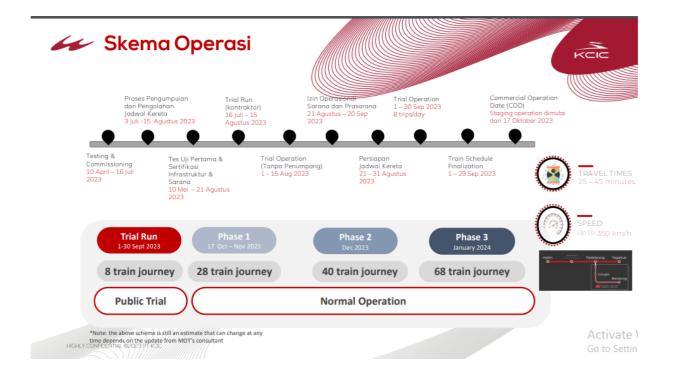
















KCIC meluncurkan Uji Coba Publik dan mengundang masyarakat sekitar, influencer dan pemangku kepentingan dengan operasi 8 perjalanan per hari

Tujuan acara ini fokus pada Kesadaran Masyarakat terhadap WHOOSH, khususnya pada: Kenyamanan, Teknologi, Kecepatan, Aksesibilitas, Fasilitas (Stasiun, Gerbang, Vending Machine, Penjualan Tiket, dll)

Program ini berhasil menjadikan WHOOSH sebagai trending topik di Media Massa dan Media Sosial mengingat antusiasme masyarakat untuk merasakan WHOOSH

Seeing is Believing

Activate \



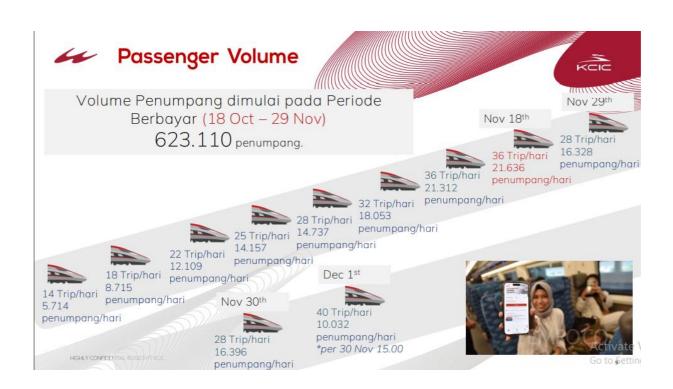
Program ini juga mengubah cara pandang pihak-pihak yang tidak menyukai proyek ini, seperti : LSM, Partai Politik, Sosial Ekonomi dan Pengamat Transportasi.

Pada akhirnya Program Pengalaman WHOOSH berhasil mencapai perspektif publik baru tentang WHOOSH sebagai Kecepatan, Andal, Aman, dan Nyaman melebihi Teknologi HSR lainnya

Seeing is Believing















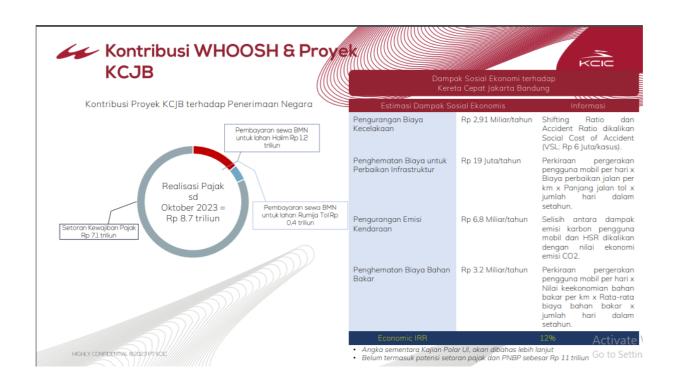


















KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT TTD.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat berfoto bersama seusai menjajal Kereta Cepat Jakarta – Bandung *Woosh*



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI berdiskusi dengan Jajaran Direksi PT KAI (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia - China bertempat di Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat



Pimpinan Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E.,M.A beserta Jajaran Direksi PT KCIC meninjau Stasiun Kereta Cepat Jakarta – Bandung Tegalluar****



Pertukaran plakat kenang-kenangan antara Tim Knspek Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Faisol Riza, S.S dengan Jajaran Direksi PT KAI (Persero).****